

Yuningsi Lero

by UNITRI Press

Submission date: 08-Jun-2022 10:47PM (UTC-0400)

Submission ID: 1853329079

File name: Yuningsi_Lero.docx (41.66K)

Word count: 2377

Character count: 15282

4
**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**
(Studi Komparasi di Kabupaten Malang dan Kabupaten Sumba Barat)

2
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH:
YUNINGSI LERO
2018110036

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang bersifat studi komparasi di Kabupaten Malang dan Kabupaten Sumba Barat yaitu Desa Sidorejo, Desa Sumber Sekar, Desa Lapale dan Desa Kalembo Kuni. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil uji ketepatan model dan uji parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN**1. 1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana telah dituangkan dalam UU tahun 2014 No 6 yang berkaitan dengan desa. Adapun salah satu mekanisme yang diatur dalam desa dapat memberikan sebuah pengaruh yang sangat pesat. Dapat dilihat dari aspek regulasi sebagaimana tidak termasuk dalam bagian UU tahun 2004 No 32 yang mana berkaitan dengan sistem pemerintahan. Lahirnya sebuah UU yang berkaitan dengan desa maka dapat pula melatarbelakangi sebuah tindakan pertimbangan yang berkaitan dengan desa yang mana sudah sejauh ini sama sekali tidak sesuai dengan tingkat perkembangan serta kedudukan yang ada pada lapisan masyarakat, sehingga demokrasi yang ada di lapisan masyarakat mampu untuk mendongkrak majunya sebuah infrastruktur yang ada di desa.

Di samping itu juga UU yang mana akan mengatur terkait dengan desa yang akan diartikan sebagai salah satu sistem pengawasan yang mana memiliki terhadap sebuah hak yang secara tradisional dalam melakukan sistem pengaturan dalam mengurus berbagai dengan jenis kepentingan yang ada pada lapisan masyarakat. Hal tersebut secara langsung dapat memberikan sebuah kesempatan terhadap desa untuk dapat mengelola desa yang secara efektif serta dapat pula dikembangkan dengan berbagai potensi sebagaimana dengan tujuan untuk dapat hidup dalam ruang lingkup kesejahteraan. Sistem pengelolaan finansial yang berada di desa secara langsung akan tidak terlepas dari keterbukaan atau akuntabel. Akuntabel yang dimiliki oleh pihak pemerintahan dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang terpenting dalam pembentukan sebuah media pertanggung jawaban oleh pihak pemerintah yang berada di desa sebagai salah satu entitas yang akan dapat mengelola pada finansial desa.

Laporan keuangan yang baik adalah sebuah pelaporan finansial yang lengkap serta akurat (Hermanto, et.al., 2021). Akuntabilitas itu penting dalam mempunyai sebuah entitas yang jauh lebih baik untuk melakukan sebuah usaha, bahkan pihak pemerintahan dapat diartikan sebagai salah satu mekanisme dalam mempertanggung jawabkan terhadap pihak yang berkepentingan dalam hal ini ialah shareholders. Lapisan pemerintahan dapat pula dikatakan sebagai salah satu kelompok atau organisasi yang mana akan diadakan sebuah pelayanan terhadap semua lapisan masyarakat. Widyatama et al (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas akan ada secara sendirian apabila ditopang oleh entitas dalam sebuah mekanisme dalam melaksanakan sebuah penerbitan

yang ada di pasar modal serta entitas secara langsung akan dapat menguasai berbagai macam aset dalam sebuah kapasitas sebagai salah satu fidusia yang benar terhadap lapisan masyarakat.

Anggaran desa merupakan sebuah anggaran yang berasal dari sebuah APBN yang bertujuan untuk dapat dimiliki oleh lapisan masyarakat atau desa yang mana akan secara langsung ditransfer berdasarkan pada APBD serta dapat pula dipergunakan dalam membiayai penyelenggaraan yang ada pada pemerintah dan pemberdayaan di kalangan masyarakat. Sebagaimana telah dituangkan dalam UU Tahun 2014 No 6 yang berkaitan dengan desa yang mana sistem pemerintahan dapat mengalokasikan anggaran desa berdasarkan dengan sistem transfer kepada pihak kota atau kabupaten. Sebagaimana dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran yang dimiliki oleh desa, maka setiap kota mampu untuk dapat mengalokasikan terhadap semua desa sebagaimana berlandaskan pada tingkat desa serta dapat pula mempertahankan dengan jumlah masyarakat yang berada di desa mencapai 30% luas wilayah mencapai 20% serta tingkat kemiskinan mencapai dengan 50%. Adapun sebuah alokasi terhadap anggaran pendapatan belanja negara mencapai 10% yang mana akan diterima oleh pihak desa. sistem pemerintahan yang berada di desa secara langsung akan dibutuhkan sebuah laporan dalam mempertanggung jawabkan (Permendagri Nomor 113, 2014). Permendagri Nomor 113 (2014) yang berkaitan dengan finansial desa dalam mengarahkan untuk membetulkan pada sebuah peraturan menteri dalam negeri pada tahun 2007 No 13 yang berkaitan dengan finansial desa.

Terdapat beberapa mekanisme yang dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap akuntabilitas diantaranya ialah sumber daya yang berasal dari desa. Salah satu sumber daya aparatur desa dapat diartikan sebagai salah satu komponen yang jauh lebih penting untuk dapat melakukan sebuah aktivitas yang berada di desa. Dalam mewujudkan sistem pembangunan yang berada di desa yang baik ialah diperlukan sebuah sistem perencanaan yang efektif, sebagaimana dapat melihat semua potensi yang ada, kinerja tim yang jauh lebih efisien. (Lasmana, 2017) menyatakan bahwa secara langsung diperlukan SDM yang lebih khususnya ialah perangkat desa profesional yang mana akan dipandang dari sisi pendidikan serta pemahaman yang maksimal. (Mudrosatun, 2017) menyatakan bahwa terdapat sumber daya yang baik maka secara langsung akan dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan terhadap akuntabilitas pada sistem pengelolaan finansial yang ada di desa. (Adillah & Muhammad, 2021) menyatakan bahwa tingkat kompetensi akan dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan terhadap sistem pengelolaan finansial yang ada di desa. (Widyatama et al., 2017) menyatakan bahwa tingkat kompetensi aparatur desa dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap sistem pengelolaan finansial yang ada di desa serta

sumber daya yang ada dimiliki secara efektif serta dapat pula memberikan juga terhadap tingkat desentralisasi. (Indriana Sari, 2017) menyatakan bahwa sistem perangkat desa dapat memberikan sebuah peran dalam melaksanakan sebuah sistem pengelolaan finansial serta dapat pula untuk melakukan terhadap finansial sebagaimana telah dituangkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada Kecamatan Sukodono, Desa Karang Sari.

Akses pada sebuah laporan finansial dapat pula dinyatakan sebagai salah satu hal yang mana akan dapat menjamin pada akuntabilitas sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai salah satu mekanisme pemerintah yang baik, disebabkan karena dapat terwujudnya sebuah pemerintah yang baik. (Kanisius, 2003) menyatakan bahwa sebuah mekanisme yang mudah dicapai secara langsung serta dapat pula diartikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan secara menerus. Publik pada dasarnya mempunyai hak yang secara mendasar dalam sistem pemerintahan diantaranya ialah dalam mendapatkan hak serta dapat pula memberikan sebuah informasi yang mana secara langsung dengan kesejahteraan.

Sebuah laporan finansial yang dimiliki oleh kalangan pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu hak yang secara publik sebagaimana harus diberikan secara langsung oleh pihak pemerintahan. (Yuni Wira Santi, Anis Rachma Utary, 2018) menyatakan bahwa sistem aksesibilitas terhadap sebuah laporan finansial yang mana secara langsung serta dapat dilihat oleh berbagai macam pihak yang membutuhkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Wardana, 2016) yang menyatakan bahwa sistem aksesibilitas secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap sebuah laporan finansial yang secara signifikan terhadap akuntabilitas finansial desa. (Nurlaili, 2016) menyatakan bahwa aksesibilitas secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah laporan keuangan yang dimiliki oleh sebuah daerah. (Shende, 2004). (Chrystiana, 2017) menyatakan bahwa sebuah akses secara langsung akan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap majalah, media serta radio secara langsung terhadap akuntabilitas yang ada pada lapisan masyarakat.

Sistem pada sebuah akuntansi secara langsung akan dapat dirancang secara efektif maka secara langsung akan dapat menjamin pada sisi akuntabilitas jauh lebih baik. Sebuah sistem informasi secara langsung akan dapat berkembang dalam sebuah kelompok atau organisasi serta lembaga pada dasarnya mempunyai sebuah tujuan yang baik dalam mengelola data atau informasi yang akurat (Indra Lesmana & Suaryana, 2014). Yang artinya bahwa apabila dapat bercenderung dalam sebuah penerapan data keuangan yang dimiliki oleh desa atau sering dikenal dengan nama siskeudes. Adapun sebuah riset yang dilakukan oleh (Julianto & Dewi,

2019) dan mengatakan bahwa sebuah sistem finansial yang dimiliki oleh desa terhadap tingkat keberhasilan atas pengelolaan anggaran desa. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk keuangan desa atau sering dikenal dengan nama SISKEUDES dapat dikatakan sebagai salah satu sistem dalam melakukan sebuah pengawasan keuangan (BPK) yang mana bertujuan untuk dapat mempermudah serta dapat mengatur sebuah pelaporan keuangan yang ada pada desa. Salah satu sistem penerapan dalam menyikapi kecurangan anggaran yang dimiliki oleh desa di NKRI masih saja ditemukan di berbagai desa yang mana tak terlepas juga di wilayah Bali. Dalam penggunaan sebuah aplikasi SISKEUDES yang mana secara terbuka dengan sebuah himbuan KPK pada tahun 2016 sebagaimana berlandaskan pada surat pada tanggal 31 Agustus No B 7508/01-16/08/2016 yang bertujuan untuk semua ¹² pimpinan desa dalam hal ini kepala desa yang berada di NKRI untuk dapat mengerti secara efektif serta dapat pula memahami sebuah aplikasi SISKEUDES sebagaimana dapat digunakan untuk mengelola finansial yang berada di desa. (Mahayani, 2017) menyatakan bahwa sistem pada akuntabilitas bukan saja sebagai melakukan sebuah tanggung jawab yang secara terbuka, akan tetapi dapat dilakukan sebuah pertanggungjawaban dalam beberapa hal antara lain kepatuhan terhadap peraturan serta pemerintah dan lapisan masyarakat.

Adapun sebuah tuntutan yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan anggaran yang dimiliki oleh desa akan dijadikan sebuah patokan yang paling terutama terhadap lapisan pemerintahan yang ada di pedesaan, disebabkan karena tingkat akuntabilitas secara langsung akan dapat mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh desa. Dalam melakukan sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang ada di desa, maka secara langsung akan dapat disajikan dalam bentuk sebuah laporan keuangan yang mana akan dapat dihasilkan berdasarkan pada sistem akuntansi yang secara keterbukaan. (Gayatri et al., 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam melakukan sebuah pengelolaan finansial yang baik, maka secara langsung akan dapat menunjukkan bahwa pihak organisasi yang berada di pemerintahan sama sekali belum sanggup untuk dapat mewujudkan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan finansial yang jauh lebih efisien.

Pihak pemerintahan yang berada di desa sebagai salah satu eksekutor dalam melakukan sebuah pengelolaan finansial yang mana mempunyai tingkat kewajiban dalam menanggapi sebuah data atau informasi yang digunakan untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. (Fajri et al., 2015) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh desa dengan efektif maka secara langsung pihak aparat pemerintah desa mampu untuk melakukan sebuah tindakan atas pertanggungjawaban. Dilansir dari (Kompas.com, 2021) mengatakan bahwa sebuah lembaga keuangan (ICW) secara langsung akan meminta pihak pemerintah desa dalam

melakukan sebuah pengawasan keuangan yang berada di desa. Dari hasil tersebut akan dapat disampaikan dalam pertemuan dengan lapisan masyarakat sebagaimana berkaitan dengan kecurangan yang akan dilaksanakan serta dapat melibatkan semua lapisan pemerintahan yang ada di desa, dari tahun 2005-2020 ditemukan kecurangan yang ada di lapisan pemerintahan desa. Sebagaimana dengan informasi atau data yang ada maka sebuah tindakan praktik kecurangan dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang ada di desa kemudian pihak ASN serta swasta. Kerugian yang dialami oleh negara yang mana akan dapat mengakibatkan tingkat kecurangan yang mencapai Rp 111 miliar. Dari angka tersebut, telah berada pada bagian 2 kedua dengan tingkat kerugian pada tahun 2022 mencapai Rp 115 miliar.

Dalam riset dilaksanakan pada Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung dan Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kecamatan Jabung memiliki 15 Desa diantaranya Desa Gunungjati, Desa Sukolilo, Desa Kenongo, Desa Sidorejo, Desa Kemantren, Desa Sidomulyo, Desa Sukopuro, Desa Pandansari Lor, Desa Argosari, Desa Gading Kembar, Desa Slamparejo, Desa Jabung, Desa Ngadirejo, Desa Taji dan Desa Kemiri. Sedangkan Kecamatan Dau dimiliki oleh beberapa desa diantaranya Desa Sumbersekar, Desa Mulyoagung, Desa Landungsari, Desa Kucur, Desa Petungsewu, Desa Selorejo, Desa Gading Kulon, Desa Karang Widoro, Desa Tegalweru serta Desa Kalisongo

Beberapa waktu lalu di salah satu Desa di Kecamatan Jabung, mantan kepala desa terlibat kasus korupsi dana desa sebesar Rp 609.342.160,- karena anaknya terlibat kasus penjambratan, menjadi alasan Mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung untuk melakukan korupsi dana desa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa masa jabatan 2007 hingga 2018. (Kabarmalang.com 2020). Faktor ini sama sekali tidak terlepas dari pola pengetahuan yang dimiliki oleh pimpinan desa, yang lebih spesifiknya pada birokrat di daerahnya. Peran perangkat desa dalam hal pelaksanaan program-program pemerintah desa di desa sumbersekar pun, dapat pula ditemukan dari para pegawai yang belum baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang berada di desa, yang mana aparat birokrasi dapat menciptakan sebuah tindakan atas sebuah pelayanan yang terbuka sebagaimana yang berkaitan dengan anggaran di sisi lain dikarenakan adanya keterlambatan gaji dan dana yang turun menjadi faktor utama dalam penerapan sebuah tindakan dengan keterbukaan

Penelitian ini masih menarik diteliti karena ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang hasilnya inkonsisten. Dari kasus yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pada Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung dan Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau di Kabupaten Malang serta ingin melihat apakah terdapat sebuah pengaruh terhadap perannya perangkat desa dalam mengelola anggaran yang dimiliki oleh desa. Sebagaimana dibahas pada latar belakang

yang ada, maka dari sini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik “ Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi komparasi di Kabupaten Malang dan Kabupaten Sumba Barat)”

2. 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa ?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa ?
4. Apakah peran perangkat Desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan desa ?

3. 1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah :

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh peran perangkat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
4. Untuk dapat mengetahui pengaruh peran perangkat Desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem Akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas laporan keuangan Desa.

4. 1.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian yang ada, sehingga dalam riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat ialah :

1. Manfaat Akademis

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memaksimalkan pola pemikiran serta wawasan peneliti dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memperkaya pemahaman serta dapat menginterpretasikan berdasarkan dengan kajian teoritis sebagaimana berlandaskan pada pengelolaan dana desa selama berada dibangku perkuliahan.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dijadikan sebuah bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan yang lebih spesifiknya pada pihak pemerintah daerah terutama perangkat desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan desa.

Yuningsi Lero

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uad.ac.id Internet Source	3%
2	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%
6	www.researchgate.net Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
8	eprints.peradaban.ac.id Internet Source	<1%
9	Ria Herlina, Taufeni Taufik, Azwir Nasir. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap	<1%

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021

Publication

10

docplayer.info

Internet Source

<1 %

11

123dok.com

Internet Source

<1 %

12

Fransiska Rahayu, Luh Dian Ekasari, Ahmad Mukoffi. "Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi", Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On